

ABSTRAK

Ella Dewi Tri 15042009: Pengawasan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram (Studi Kasus di Pangkalan *Liquefied Petroleum Gas* 3 Kilogram di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang)

Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 95 tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram ditingkat pangkalan sebesar 17.000 di Kota Padang, dalam pengawasan dilakukan oleh tim pembinaan dan pengawasan dikeluarkannya Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang Nomor 800.IV.2294.IX/09-2017, namun dalam pengawasan yang ditemukan penulis belum optimal ditandai dengan banyaknya pangkalan di Kelurahan Parupuk Tabing yang menjual *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram diatas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan, kurangnya koordinasi antara instansi yang terlibat dalam pengawasan, tidak adanya sanksi atau tindakan yang tegas yang diberikan oleh tim pengawasan terhadap pangkalan yang melakukan penyimpangan, dan papan blank usaha Harga Eceran Tertinggi yang tidak mendapat pemeriksaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengawasan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang serta hambatan dan upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dekriptif Kualitatif, penelitian dilakukan di Sekretaris Daerah Kota Padang, Dinas Perdagangan Kota Padang, PT. Pertamina (Persero) Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja dan pangkalan di Kelurahan Parupuk Tabing Kota Padang, informan penelitian ditentukan secara *porpositive sampling* sedangkan penarikan sampel pada masyarakat menggunakan teknik *sampling insidental*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengawasan Harga Eceran Tertinggi *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram yang dilakukan di Kelurahan Parupuk Tabing belum optimal ditemukan terdapat pangkalan yang tidak pernah diperiksa oleh tim pembinaan dan pengawasan, hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia dalam pengawasan, kurangnya koordinasi, serta peraturan yang ada kurang mengakomodir pelaksanaan pengawasan dilapangan.

Kata Kunci: *Pengawasan, Pangkalan, Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram*